

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Agraris dimana mayoritas penduduknya menggantungkan diri pada sektor pertanian, hal ini dibuktikan oleh jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani mencapai 33.4 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2019), disamping itu luas lahan pertanian yang ada di Indonesia mencapai 7.46 juta Ha untuk sawah dan 35.19 juta Ha (Badan Pusat Statistik, 2019) untuk keseluruhan meliputi sawah, kebun, ladang, tegal dsb. Dengan jumlah penduduk dan luas lahan pertanian tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah Negara Agraris terbesar yang ada di Dunia.

Di antara berbagai macam jenis komoditas pertanian yang ada di Indonesia, Padi menjadi komoditas yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat. Padi yang kemudian diolah menjadi beras memiliki peranan yang sangat vital dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Di Indonesia beras merupakan makanan pokok dan juga makanan yang mengandung karbohidrat (Mubyarto, 1989:16).

Keberadaan beras sebagai makanan pokok hingga kini juga masih belum dapat tergantikan oleh makanan pokok lainnya, sehingga muncul ungkapan “Belum kenyang kalau belum makan nasi”, narasi yang menunjukkan betapa tergantungnya masyarakat Indonesia akan beras, dengan konsumsi beras perkapita mencapai 96.3 kg /pertahun (Badan Pusat Statistik, 2018). Kendati demikian, tingginya konsumsi beras tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat perekonomian petani di Indonesia.

Pulau Sumatera merupakan penghasil padi terbesar di Indonesia setelah pulau Jawa yang merupakan sentra penghasil beras. Dalam Pulau Sumatra sendiri Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah penghasil besar terbesar dengan produksi padi berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2017, mencapai 5,136,186 Ton, dimana hasil produksi tersebut dihasilkan dari lahan sawah seluas 415,675 Ha (Badan Pusat Statistik, 2017).

Besaran Produksi padi yang ada di Sumatera Utara berasal dari beberapa Kabupaten yang memang menjadi sentra produksi padi tahunan, seperti Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan Kabupaten dengan produksi padi terbesar di provinsi ini berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara tahun 2019, ditempati oleh Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas panen mencapai 82,856.8 Ha yang kemudian menghasilkan 424,226.8 Ton Padi.

Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan sentra produksi padi Provinsi seharusnya menjadi daerah yang paling maju di banding daerah lainnya, akan tetapi idealita tersebut berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di lapangan, ibarat pepatah “ Jauh Panggang dari Api “. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik 2019, Kabupaten Mandailing Natal menjadi daerah paling tertinggal ke 5 di Sumatera Utara dengan Indeks Pembangunan Manusia hanya mencapai 66.52, berada di atas 4 kabupaten lain yang berada di pulau Nias.

Jika dilihat dari tingkat kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Siabu menjadi penyumbang produksi padi terbesar dengan jumlah sebesar 73,505 ton (Badan Pusat Statistik Kab.Madina, 2018) dan jumlah

memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan dengan kecamatan lain.

Tabel 1. Jumlah Produksi Padi di Kabupaten Mandailing Natal 2018

No.	Kecamatan	Produksi	Rata-rata Produksi
1	Batahan	2.751	49,80
2	Sinunukan	4.090	49,80
3	Batang Natal	8.762	52,60
4	Lingga Bayu	9.241	51,90
5	Ranto Baek	3.260	49,80
6	Kotanopan	17.527	52,90
7	Ulu Pungkut	5.166	52,80
8	Tambangan	16.156	52,70
9	Lembah Sorik Marapi	14.620	52,90
10	Puncak Sorik Marapi	9.259	52,80
11	Muara Sipongi	2.408	52,70
12	Pakantan	5.304	52,90
13	Panyabungan	38.666	52,70
14	Panyabungan Selatan	13.194	52,30
15	Panyabungan Barat	14.824	52,70
16	Panyabungan Utara	19.149	52,90
17	Panyabungan Timur	36.55	52,80
18	Huta Bargot	10.100	52,70
19	Natal	23.221	49,20
20	Muara Batang Gadis	16.918	49,80
21	Siabu	73.505	52,90
22	Bukit Malintang	11.065	52,80
23	Naga Juang	3.825	52,70
TOTAL		326.666	52.23

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Mandailing Natal 2018

Namun, tingginya angka Produksi padi yang berbanding lurus dengan tingginya tingkat konsumsi beras tidak menjamin membaiknya kesejahteraan petani, karna memang faktanya mayoritas masyarakat yang mengalami permasalahan perekonomian adalah petani. Permasalahan perekonomian tersebut dapat dikatakan hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dari data BPS 2019 yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin Indonesia mayoritas berasal dari daerah

pedesaan dengan jumlah mencapai 15,149,920 Penduduk, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mata pencaharian masyarakat di daerah pedesaan pada umumnya adalah sebagai petani.

Rendahnya perekonomian petani tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya yakni pada sektor distribusi, panjangnya alur tataniaga komoditas padi dan beras membuat petani sebagai produsen mendapatkan harga yang rendah untuk penjualan, sementara harga beras yang beredar di masyarakat sebagai konsumen tetap tinggi.

Di samping itu, rendahnya peran pemerintah dalam tata niaga beras di daerah juga turut membuat keadaan semakin sulit, dengan rendahnya peran dari pemerintah membuat peran pihak swasta yang lebih dominan sehingga mata rantai saluran tataniaga menjadi lebih panjang, mulai dari tingkat petani hingga konsumen akhir yang berdampak pada besarnya perbedaan harga produk yang diterima oleh petani dengan harga produk yang dibayarkan oleh konsumen akhir.

Pemerintah sendiri sudah membuat kebijakan guna menaikkan harga padi dan beras, melalui penetapan harga pembelian Pemerintah (HPP) terbaru sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 dengan harapan dapat menaikkan perekonomian petani, dimana (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp. 4,200,- per kilogram di tingkat petani (semula Rp. 3,700,-), Gabah kering giling (GKG) di penggilingan padi Rp. 5,250,- perkilogram dan Rp. 5,300,- per kilogram di Perum Bulog, sedangkan untuk beras naik dari Rp. 7,300,- per kilogram menjadi Rp. 8,300,- per kilogram di gudang Perum Bulog (Bulog,2020).

Namun kebijakan tersebut seakan tidak menyentuh petani akibat Lembaga tataniaga yang didominasi oleh pihak swasta.

Permasalahan tersebut turut terjadi di Kecamatan Siabu yang merupakan Wilayah Sentra Produksi beras terbesar dalam Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 51,374 jiwa (BPS. 2019) yang terbagi atas 12,122 KK ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani, dengan persentase yang sangat tinggi, yakni mencapai 87% (10,541 KK) merupakan Petani yang kemudian tergabung dalam 392 Kelompok Tani. Selain itu, luas baku lahan sawah di kecamatan tersebut terbilang tinggi, dengan luas mencapai 6376.5 Ha dan merupakan kecamatan dengan luas baku sawah terbesar dalam Kabupaten Mandailing Natal, yang kemudian menghasilkan produksi padi sebesar 73,505 Ton berdasarkan data BPS 2019. Sehingga tidak mengherankan kecamatan ini menjadi produsen padi terbesar di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, bahkan dalam Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2. Luas Baku Lahan Sawah di Mandailing Natal 2019

No.	Kecamatan	Luas Baku Sawah (Ha)		
		Irigasi	Tadah Hujan + Rawa Lebak	Jumlah
1	Batahan	0	115	115
2	Sinunukan	171	79	250
3	Batang Natal	439	0	439
4	Lingga Bayu	514	0	514
5	Ranto Baik	220	0	220
6	Kotanopan	1,451	0	1,451
7	Ulu Pungkut	275	0	275
8	Tambangan	826	0	826
9	Lembah Sorik Marapi	854	0	854
10	Puncak Sorik Marapi	637	0	637
11	Muara Sipongi	133	0	133
12	Pakantan	275	25	275
13	Panyabungan	2,142	0	2,142

Tabel 2. Lanjutan

No.	Kecamatan	Luas Baku Sawah (Ha)		
		Irigasi	Tadah Hujan + Rawa Lebak	Jumlah
14	Panyabungan Selatan	822	0	822
15	Panyabungan Barat	813	0	813
16	Panyabungan Utara	1,167	0	1,167
17	Panyabungan Timur	170	0	170
18	Huta Bargot	635	0	635
19	Natal	500	1.230	1.730
20	Muara Batang Gadis	29	1.211	1.240
21	Siabu	6.376	0	6.376
22	Bukit Malintang	726	0	726
23	Naga Juang	218	0	218
TOTAL		19,393	2.650	22,053

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019

Berdasarkan pengamatan penulis yang merupakan penduduk asli dari wilayah ini, Masyarakat kecamatan Siabu pada umumnya langsung menjual hasil panen padi kepada pengepul ataupun tempat penggilingan padi tanpa proses pengolahan yang lebih lanjut, dengan harga yang relatif rendah. Penjualan tersebut dilakukan guna memperoleh uang yang kemudian digunakan untuk membayar biaya sewa buruh tani dan pihak yang turut serta dalam proses pemanenan. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang mengolah padi hasil panen menjadi beras kemudian dijual langsung kepada konsumen dengan jumlah yang relatif sedikit ataupun dijadikan sebagai bahan pangan konsumsi keluarga, mengingat harga beras pada tingkat konsumen di Kelurahan Siabu terbilang mahal walaupun merupakan daerah sentra produksi padi.

Mubyarto (1986) menyatakan bahwa sistem tataniaga dikatakan efisien jika memenuhi dua syarat berikut:

1. Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani sebagai produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya.
2. Mampu mengadakan pembagian yang adil (dalam hal pemberian balas jasa sesuai sumbangannya masing-masing dari pada keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan tataniaga barang tersebut.

Jika dilihat 2 syarat diatas, maka dapat dikatakan bahwa Tataniaga komoditas padi dan Beras di Kecamatan Siabu tidak Efisien. Karna berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan peneliti, harga beras di Kelurahan Siabu pada Pedagang Eceran mencapai Rp. 11.000 – Rp. 12.000 / kg, dan untuk harga beras di kilang padi (penggilingan padi) sedikit lebih murah dari harga pasar, yakni +- Rp. 10.000 / kg, angka tersebut masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga beras yang dijual di perum bulog. Sedangkan harga padi (gabah) yang dijual petani kepada pengepul / kilang padi hanya berada dikisaran Rp. 3.900 – 4.200 / kg dan harga tersebut cenderung stabil sepanjang tahun, karna mayoritas petani di daerah ini langsung menjual padi (gabah) setelah panen, walaupun petani bebas memilih tempat penjualan hasil produksi tersebut namun harga penawarannya tetap berada pada kisaran angka tersebut, dan tidak sedikit pula petani yang terpaksa menjual hasil padinya kepada pengepul rentenir. Sehingga keadaan tersebut jelas terlihat terdapat perbedaan harga yang sangat jauh antara harga jual petani sebagai produsen dengan harga beli yang didapatkan masyarakat sebagai konsumen.

Padi yang dijual petani kepada pengepul (pihak yang membeli padi dalam jumlah besar) akan diolah menjadi beras kemudian didistribusikan ke luar daerah bahkan sampai luar provinsi, sedangkan padi yang dijual ke penggilingan padi biasanya akan diolah menjadi beras kemudian dijual kembali kepada masyarakat sekitar dengan skala wilayah yang lebih kecil, walaupun terdapat beberapa kilang padi yang menjual beras dengan luar daerah dengan merk dagang sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa tata Niaga komoditas Padi dan Beras di Kecamatan Siabu, selain tidak efisien juga memiliki alur yang cukup Panjang.

Maka berdasarkan uraian di atas, Penelitian dengan judul “ **Analisis Alur Tata Niaga Komoditas Padi di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal** ”, dinilai penting dan mendesak untuk segera dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya perekonomian petani di kecamatan Siabu yang dipengaruhi oleh alur tataniaga komoditas padi.
2. Lembaga tataniaga komoditas padi didominasi oleh pihak swasta.
3. Terdapat perbedaan yang terbilang besar antara harga jual padi (gabah) petani sebagai produsen kepada pengepul dengan harga beli beras yang didapatkan masyarakat sebagai konsumen.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan, waktu, maupun untuk menghindari permasalahan yang meluas dalam penelitian serta untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka pembatasan masalah dititikberatkan pada:

1. Penelitian ini lebih difokuskan pada alur tataniaga komoditas padi dari pada pengaruh alur tataniaga tersebut terhadap kondisi ekonomi sosial masyarakat
2. Penelitian ini hanya terfokuskan pada Alur Tataniaga Komoditas Padi yang diproduksi di Kecamatan Siabu.
3. Penelitian ini berfokus pada perubahan Harga yang terjadi terhadap komoditas Padi yang diproduksi di Kelurahan Siabu pada setiap Lembaga Tataniaga berdasarkan pengaruh faktor jarak distribusi.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Alur Tataniaga Komoditas Padi di Kecamatan Siabu ?
2. Bagaimana Margin Tataniaga Komoditas Padi berdasarkan perubahan harga yang terjadi pada setiap tingkatan Lembaga Tataniaga Akibat Faktor Jarak Distribusi ?

E. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui Alur Tataniaga Komoditas Padi di Kecamatan Siabu?

2. Untuk mengetahui Margin Tataniaga Komoditas Padi berdasarkan perubahan harga yang terjadi pada setiap tingkatan Lembaga Tataniaga Akibat Faktor Jarak Distribusi?

F. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang baik dan jelas mengenai Alur Tataniaga Komoditas Padi di Kecamatan Siabu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam Alur tataniaga Komoditas Padi yang ada di Kelurahan Siabu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Petani, untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang Alur Tataniaga Komoditas Padi yang terjadi di Kelurahan Siabu.
- b. Bagi peneliti, sebagai bahan informasi serta sebagai pegangan bagi peneliti dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik dimasa yang akan datang.

- c. Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

3. Manfaat Politis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan alur tataniaga khususnya komoditas padi bagi pemerintah.

THE
Character Building
UNIVERSITY